



WAWANCARA AGUNG AYU RATIH

“Pengetahuan perempuan dalam sejarah agak dangkal dan cenderung mengulang-ulang argumen yang sama “

Agung Ayu Ratih adalah salah seorang pendiri dan Direktur Eksekutif Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), lembaga arsip independen dan perpustakaan yang dibentuk oleh beberapa sejarawan dan pekerja kemanusiaan pada tahun 2003. Antara tahun 2000-2010 bersama sejarawan John Roosa, ia mengoordinasi sejumlah periset pemula untuk mewawancarai ratusan penyintas kekerasan massal anti komunis 1965-1966 dan membangun arsip digital sejarah lisan. Hasil penelitian ini diterbitkan dalam buku kumpulan esai *Tahun yang Tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65* (2004). Ia aktif dalam berbagai kelompok kebudayaan dan organisasi kemanusiaan sebagai penasihat, peneliti, dan pekerja kemanusiaan. Pada 2008 ia diminta memberikan Pidato Kebudayaan yang bertajuk “Kita, Sejarah, dan Kebhinekaan: Merumuskan Kembali Keindonesiaan” dalam rangka ulang tahun Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

Dalam perkembangan Historiografi sejarah Indonesia, sumbangan berharganya ia tulis bersama John Roosa tentang sejarah lisan, “Sejarah Lisan dan kajian subjektivitas” dalam buku

Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia (2008). Ia ditugaskan pula menjadi tenaga ahli dalam Gugus Tugas Pelanggaran HAM Perempuan Masa Lalu di Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan terlibat dalam penyusunan buku *Kita Bersikap: Empat Dasawarsa Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perjalanan Bangsa* (2009). Saat ini ia sedang menyelesaikan disertasi di University of British Columbia, Kanada berdasarkan penelitiannya tentang memori dan imajinasi berbangsa perempuan-perempuan penyintas kekerasan anti komunis 1965-1966 dalam konstruksi ruang-ruang sosial bersejarah. Analisis Agung Ayu Ratih mengenai sejarah perempuan selama ini yang masih lamban dalam perkembangannya tentunya memiliki argumen yang beralasan. Gung Ayu—begitu ia biasa disapa—memberikan catatan panjang lebar mengenai apa itu sejarah perempuan, konsep, pengalaman sebagai sejarawan perempuan, serta bagaimana seharusnya menulis sejarah perempuan. Edisi Jurnal Sejarah kali ini menurunkan hasil wawancara secara tertulis kepada Agung Ayu Ratih.

JS: Kita akan bicara tentang profil dan pengalaman. Apakah bisa diceritakan pengalaman sebagai sejarawan perempuan dalam menekuni sejarah selama ini? Sejak kapan menekuni sejarah perempuan? Adakah perbedaan pengalaman saat di masa Orde Baru dan Reformasi saat menekuni sejarah perempuan?

AAR: Saya sebenarnya masuk dalam bidang sejarah tanpa rencana. Saya selalu tertarik pada sejarah, terutama dalam kaitannya dengan soal-soal kebangsaan, karena sejak kecil saya dikelilingi orang-orang yang suka bercerita tentang asal-usul mereka. Misalnya, ayah saya amat berminat pada sejarah Indonesia dan sampai akhir hayatnya tekun membacai babad dan lontar warisan leluhur untuk menulis riwayat keluarga besarnya. Namun, untuk waktu yang lama saya lebih tertarik pada bahasa dan sastra. Karena itu untuk studi S1 saya memilih belajar tentang pendidikan bahasa dan sastra Inggris. Saya baru belajar sejarah secara formal ketika saya melanjutkan studi S2 dalam bidang studi Asia Tenggara di University of Wisconsin-Madison, Amerika Serikat sekitar 1990-an. Itu pun tidak sengaja. Untuk studi wilayah saya dituntut mengambil kelas-kelas tentang Asia Tenggara dari berbagai disiplin—antropologi, sosiologi, sejarah dan sastra—sebelum menentukan titik berat untuk riset lebih lanjut.

Ternyata yang paling berkesan adalah kelas-kelas sejarah yang diampu sejarawan ternama Alfred McCoy – dia banyak menulis tentang Filipina, perdagangan narkoba ilegal, dan politik luar negeri AS. Dia dikenal sebagai “dosen killer” karena tuntutan yang sangat tinggi. Anehnya, dia tertarik dengan makalah-makalah yang saya tulis dan bersedia meluangkan waktu untuk membimbing saya, mulai dari cara menulis yang baik, mencari sumber yang tepat, sampai membangun argumen melalui narasi. Saya sempat kewalahan karena untuk kelas sejarah Perang Pasifik, misalnya, tugas saya adalah meneliti dokumen pengadilan Jendral Tojo Hideki dalam bentuk mikrofilm sebanyak kurang lebih 6000 halaman! Tetapi, saya ingat betul saat saya berniat “melarikan diri” dari tugas ini, Al McCoy melongok dari kantornya dan hampir berteriak, “*Do you want to become a good historian?* [Apakah kamu ingin menjadi sejarawan yang baik?]” Dia lalu menjadi pembimbing untuk menulis tesis MA saya tentang cara Suharto mengkooptasi kelas menengah dengan ilusi konstitusionalitas pemerintahannya. Saya berhutang budi kepada dosen satu ini.

Di Indonesia saya belajar sejarah secara tidak formal dari pergaulan dengan kawan-kawan sejarawan di Jaringan Kerja Budaya (JKB), seperti Hilmar Farid, Razif, Andi Achdian, dan belakangan M. Fauzi. Mereka memperkenalkan saya kepada dekade-dekade permulaan abad ke-20 dengan tokoh-tokoh pergerakannya yang di zaman Suharto dianggap terlarang, seperti Mas Marco Kartodikromo, Haji Misbach, Darsono, dkk. Lebih jauh lagi, mereka membawa saya bertemu dengan pelaku-pelaku sekaligus penulis sejarah, yang juga disingkirkan penguasa, seperti sastrawan Pramoedya Ananta Toer dan eks-tapol (tahanan politik) lainnya. Lewat

jaringan ini saya berkenalan dengan penulis Hersri Setiawan, yang pertama kali memberi inspirasi kepada saya dan John Roosa untuk melakukan penelitian sejarah lisan. Di luar lingkaran “subversif” ini saya memperoleh pemahaman lebih baik tentang sejarah dan historiografi Indonesia dari pertemuan-pertemuan dengan Bambang Purwanto, Mona Lohanda, Budiawan, dan Asvi W. Adam. Keterbukaan mereka, kesiapannya membangun kritisisme, dan sikap mereka yang egaliter sungguh membantu orang-orang baru di dunia sejarah Indonesia seperti saya.

Saya mulai berpikir tentang perempuan dalam sejarah ketika saya bertemu dengan ibu-ibu mantan tapol dan penyintas kekerasan massal anti-komunis 1965 di awal 2000-an. Saya dan beberapa teman aktivis perempuan mengorganisasi kegiatan Lingkar Tutar Perempuan (LTP) untuk memberi ruang bicara yang aman dan leluasa bagi para ibu penyintas (Ratih, 2019). Dalam sekian kali kesempatan berdiskusi mereka selalu menekankan pentingnya penulisan kembali sejarah karena yang diajarkan di sekolah tentang mereka dan Gerwani tidak benar. Kisah-kisah bohong ini menyebabkan ketegangan dalam hubungan mereka dengan anak-cucu dan keluarga besar mereka. Bagi para ibu penyintas klarifikasi historis penting untuk rekonsiliasi keluarga. Pernyataan ibu-ibu ini bukan saja menjadi amanat, tetapi juga tantangan bagi saya sebagai intelektual-aktivis yang sedang belajar sejarah. Saat itu saya dan teman-teman di Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) sedang sibuk melakukan wawancara sejarah lisan dengan ratusan penyintas kekerasan massal 1965, sekaligus membangun perpustakaan dan arsip tentang sejarah gerakan sosial di Indonesia. Pergaulan saya dengan ibu-ibu penyintas lewat Tutar Perempuan benar-benar mengubah cara pandang saya tentang mereka sebagai manusia perempuan, tentang gerakan perempuan, dan sejarah Indonesia. Saya mulai melihat ibu-ibu ini bukan saja sebagai korban atau penyintas dalam kerangka pencatatan pelanggaran HAM, tetapi juga pelaku sejarah, pejuang pembebasan perempuan dan Indonesia. Pengalaman ini pula yang membuat saya berpikir lebih serius tentang sejarah pemikiran feminis dan hubungannya dengan pertumbuhan rasa kebangsaan di Indonesia.

Sudah saya katakan bahwa saya sangat tertarik dengan masalah kebangsaan, dan sejak studi S2 saya mulai menekuni tema tersebut secara akademik. Tetapi, saya tidak pernah serius berpikir tentang hubungan antara perempuan dan kebangsaan. Agak aneh, karena saya terkesan dengan tulisan-tulisan Kartini, yang sarat dengan pemikiran-pemikirannya tentang peran perempuan dalam membangun bangsa. Baru setelah saya membaca buku Pramoedya Ananta Toer (2000), *Panggil Aku Kartini Saja*, saya melihat Kartini sebagai pionir pemikiran tentang nasionalisme yang feminis. Ini mungkin yang dibahas sejarawan feminis Gerda Lerner sebagai kondisi “ketidakpedulian terlatih” [*trained ignorance*] pada kaum perempuan, yang terdidik sekalipun. Dalam proses berpikir, “perempuan terlalu terbiasa untuk mendebat pandangan pemikir besar yang kebanyakan laki-laki ketimbang memperkuat diri dengan [pengalaman dan pikiran] para ibu pendahulunya” (Lerner, 1993).

Dari pengalaman berulang-ulang membaca surat-surat Kartini dan pembahasan tentangnya dari berbagai penulis saya memeriksa lebih lanjut bagaimana perempuan memaknai semangat berbangsa dari masa ke masa. Satu hal yang menghubungkan Kartini dengan ibu-ibu penyintas, terutama yang aktif di organisasi-organisasi massa, apakah itu Gerwani, Pemuda Rakyat, BTI, atau Lekra, adalah kepedulian mereka yang pekat terhadap pembangunan bangsa oleh gerak perempuan. Bahkan, saya berani mengatakan dalam beberapa hal ibu-ibu pejuang ini lebih memperhatikan masyarakat daripada keluarga mereka sendiri. Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi saya, dan sampai hari ini masih saya teliti. Mengapa mereka begitu peduli dengan bangsa yang sebagian anggotanya sudah menganiaya dan menolak keberadaan mereka? Pengalaman berbangsa seperti apa saja yang pernah mereka peroleh? Apa bayangan baik mereka tentang Indonesia di masa depan?

Keterkaitan antara perempuan dan nasion menjadi masalah penting dalam penelitian sejarah perempuan, terutama untuk memperlihatkan ketegangan antara feminisme dan nasionalisme

di negeri-negeri bekas jajahan. Hampir semua literatur yang membahas tentang nasion dan perempuan pasti berkesimpulan bahwa nasionalisme, walaupun memungkinkan perempuan untuk terlibat dalam politik terutama di negeri-negeri terjajah, pada akhirnya akan merugikan perempuan. Menariknya, dalam ingatan perempuan-perempuan penyintas yang saya kenal, gerakan nasionalis anti-kolonial justru sudah membebaskan mereka. Kemudian, dalam menghadapi gempuran pasca Gestok 1965, nasionalismelah yang menyelamatkan mereka dari demoralisasi. Nasionalisme bagi para penyintas menjadi semacam terapi spiritual.

JS: Selanjutnya tentang konsep sejarah Perempuan:.. Bagaimanakah anda memandang sejarah perempuan menurut Anda dan bagaimana hal itu di Indonesia sebaiknya ditulis (historiografi)?

AAR: Tidak mudah bagi saya untuk mendefinisikan sejarah perempuan. Begitu banyak silang pendapat tentang apa dan bagaimana sejarah. Menambahkan kata “perempuan” semakin memperluas wilayah perdebatan. Mungkin karena pengaruh pendidikan sastra, saya cenderung melihat sejarah sebagai cerita tentang cara manusia berpikir yang diperkuat oleh rangkaian kerja-kerja ilmiah : penyelidikan, pemilihan dan perekaman data atau sumber sejarah, interpretasi terhadap data/sumber, dan penyusunan narasi. Saya melihat penelitian sejarah sebagai aneka upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan epistemologis yang tidak ada putusnya. Kita selalu bertanya dari mana kita tahu apa yang kita tahu, dan melacak asal-usul pengetahuan tersebut. Saya juga sangat tertarik dengan gagasan William Sewell tentang “temporalitas sosial” sebagai perhatian utama sejarawan (Sewell, 2005). Kita berusaha mengungkap bagaimana tindakan manusia berubah-ubah seiring dengan waktu dan pengaruhnya bagi pengorganisasian dan transformasi hubungan-hubungan sosial. Di sini menurut saya kepandaian bercerita menjadi penting karena kita tidak sedang membuat catatan kejadian secara kronologis dan faktual seperti laporan pelanggaran HAM. Kita mencoba menjelaskan konteks sosio-historis yang melatar-belakangi terjadinya suatu tindakan dan peristiwa dengan logis.

Menempatkan “perempuan” sebagai kategori dalam studi sejarah bisa jadi problematik. Di kalangan sejarawan feminis di AS dan Kanada timbul perdebatan sengit tentang keabsahan istilah “sejarah perempuan” sejak 1980-an, yang antara lain dipicu oleh kegelisahan mereka akan kegagalan feminisme dalam membuat terobosan teoretik di bidang sejarah. Salah satu gugatan telak yang sampai hari ini masih diperbincangkan adalah artikel yang diterbitkan sejarawan feminis ternama Joan Scott (1986), “Gender : a Useful Category of Historical Analysis”. Scott berargumen bahwa sejarawan harus mempertimbangkan beragam makna yang termuat dalam kategori-kategori “perempuan”, “laki-laki”, “keperempuanan”, dan “kelakian” dari masa ke masa. Dia mengamati bahwa sejarawan bersikap ahistoris ketika menganggap identitas gender sebagai fakta biologis yang tak berubah-ubah sejak zaman purba hingga masa kini. Sejarawan feminis sekalipun sering terjebak dalam simplifikasi saat meneliti *perempuan* tanpa mempertanyakan perubahan-perubahan historis yang berpengaruh terhadap makna kategori tersebut.

Scott mewakili pendekatan sejarawan kultural, yang bermunculan di kampus-kampus di AS, Kanada dan Eropa pada 1980-an, dan menandai peralihan kecenderungan populer dalam penulisan sejarah dari sejarah sosial ke sejarah kultural. Mereka menentang “esensialisme” dalam melihat identitas apapun sebagai hal yang konstan dan mengusulkan “konstruktifisme sosial”, terutama untuk mengamati kesejarahan hubungan-hubungan yang tidak setara. Scott tidak berhenti pada argumen bahwa masyarakat mengkonstruksi gender. Lebih jauh lagi, ia mengatakan bahwa identitas berdasarkan gender beroperasi di balik semua bentuk hirarki sosial seperti hubungan-hubungan kelas dan ras. Gender ada di mana-mana; gender adalah “cara utama untuk menandai perbedaan” (hal. 1086).

Proposisi Scott sebenarnya cukup menggugah. Ia membuat terobosan paradigmatis dalam studi sejarah untuk membuktikan kekuatan feminisme—yang melahirkan analisis gender—sebagai kerangka teoretik. Tetapi, proposisi ini lahir dari tradisi penulisan sejarah perempuan yang panjang dan kaya perdebatan. Sebelum menekuni kegunaan teori-teori pascastrukturalis bagi penelitian sejarah, Scott sendiri menulis dua buku sejarah sosial yang sangat baik tentang dampak revolusi industri dan inovasi teknologi terhadap politik kelas buruh, sifat kerja perempuan, dan posisi perempuan dalam keluarga. Kita belum sempat membangun tradisi seperti ini. Setahu saya belum ada sejarah sosial tentang perempuan yang, misalnya, dapat memperlihatkan pengalaman perempuan dari kelas atau latar belakang etnis yang berbeda-beda di dalam keluarga, di tempat kerja, atau lingkungan hidup lainnya. Karena itulah menurut saya masih perlu untuk memperbanyak penelitian tentang gerak perempuan dari masa ke masa dengan perspektif gender yang kuat.

Penghancuran luar biasa terhadap Gerwani, yang diikuti dengan penghilangan pengetahuan tentang lintasan bersejarah perjuangan perempuan, berpengaruh besar terhadap perkembangan pemikiran feminis di Indonesia. Ada keterputusan sejarah yang membatasi imajinasi kita tentang apa itu perempuan Indonesia dan bagaimana keperempuanan Indonesia, padahal acuan kesejarahan kita dari ujung ke ujung Nusantara bukan main kayanya. Alhasil, pengetahuan umum kita tentang perempuan dalam sejarah agak dangkal dan cenderung mengulang-ulang argumen yang sama. Kita fasih menyebutkan nama-nama pahlawan perempuan, seperti litani orang kudus. Kita melihat nama-nama mereka bertebaran di ruang publik, entah sebagai nama jalan, gedung, taman, atau dirapal dalam peringatan hari-hari besar nasional. Tetapi, kecuali dari surat-surat Kartini, kita tidak tahu persis kehidupan mereka sebagai pribadi-pribadi. Seperti apa, misalnya, struktur patriarki yang dihadapi Tjoet Nja' Dhien atau Christina Maria Tiahahu? Apa yang membuat Kesultanan Aceh Darussalam memberi kesempatan kepada empat perempuan untuk memimpin wilayahnya? Apakah perempuan menjadi pimpinan gerakan perlawanan bersenjata atau pemerintahan cukup menjadi penanda tumbuhnya kesadaran feminis?

Gerakan feminis di Indonesia membutuhkan landasan pengetahuan historis yang lebih kokoh. Seperti dikatakan Judith Bennet, “medan juang feminisme itu sejarah perempuan” (Bennett, 2006). Tentu saja saya mempertimbangkan sumbangan besar karya-karya sejarah perempuan yang disusun oleh Cora Vreede de Stuers, Susan Blackburn, Elizabeth Martyn, dan Saskia Wieringa. Mereka memberi gambaran yang baik tentang tumbuhnya kesadaran politik perempuan dan perwujudannya dalam organisasi-organisasi perempuan sejak zaman kolonial. Esai-esai yang ditulis Elsbeth Locher-Scholten membantu kita memahami kaitan antara penataan hubungan kaum perempuan dari ras yang berbeda-beda dengan upaya pemantapan negara kolonial. Secara khusus saya menghargai riset Wieringa untuk ketekunannya melacak dan mendengarkan cerita para ibu yang sudah berjuang untuk melahirkan dan membesarkan republik ini, terutama kisah mereka yang puluhan tahun dihilangkan suaranya. Cerita-cerita mereka penting sekali karena begitu sedikit tulisan sejarah nasional yang ruang bagi subjektivitas dan keagenan perempuan dalam gerakan nasionalis. Dari segi teoretik studi Wieringa juga penting karena ia memperkenalkan gagasan “politik seksual” dan memperlihatkan bagaimana penguasa menggunakan seksualitas untuk menganiaya perempuan dan menghabisi satu golongan yang dituduh mengkhianati negara-bangsa ini.

Kita perlu lebih banyak lagi studi sejarah yang memperlihatkan subjektivitas dan keagenan perempuan di luar keterlibatannya dalam organisasi dan di ranah-ranah yang berbeda. Salah satu artikel yang dapat jadi contoh adalah studi Erwiza Erman (2004) tentang pengaruh ideologi gender terhadap pembentukan komunitas buruh penambangan batubara di Ombilin dan perubahan-perubahan sosial yang muncul sejak perempuan hadir dalam komunitas tersebut pada akhir abad ke-19 hingga 1965. Dengan teliti Erman menelisik keterkaitan gender, ras, etnisitas, kelas, dan nasion untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan manajemen dalam mengatur

komposisi dan kerja buruh, terbentuknya keluarga dan rumah tangga, dan pengaruh perempuan terhadap pasang surut politik resistensi buruh. Dalam satu studi pendek ia berhasil memperlihatkan bahwa perempuan bukan sekadar sosok pasif yang dikonstruksi bidang-bidang diskursif. Perempuan menemukan berbagai cara untuk menggugat konstruksi peran yang ditetapkan bagi dirinya dan memperluas bidang geraknya secara individual pun kolektif.

Bagi perkembangan historiografi di Indonesia gender sebetulnya dapat menjadi alat analisis yang sangat berguna, bukan hanya untuk penelitian sejarah perempuan. Tradisi transgender dan homoseksualitas dalam kegiatan-kegiatan budaya berbagai suku bangsa di Nusantara cukup kuat dan berakar, seperti kehadiran *bissu* di kalangan masyarakat Bugis, *warok* dan *gemblak* dalam kesenian reog, atau penari-penari *lengger* di Jawa. Selama ini hanya ahli-ahli antropologi yang mempelajari keberagaman gender di wilayah Nusantara. Menurut saya, sudah saatnya sejarawan mengeksplorasi wilayah seksualitas untuk memperkaya studi sejarah secara interdisipliner. Penelitian sejarah memungkinkan penggambaran lebih komprehensif bagaimana tradisi-tradisi tersebut berkembang dari masa ke masa, sekaligus memperlihatkan perubahan macam-macam gagasan dan bayangan ideal tentang femininitas dan maskulinitas dalam masyarakat Nusantara. Untuk mengamati cara-cara penguasa mengakomodasi atau malah menindas keberagaman seksualitas, kita dapat juga mengikuti studi-studi Ann Stoler (1995, 2010) tentang bagaimana pemerintah kolonial Belanda mengkonstruksi kategori-kategori rasial untuk mengendalikan hubungan sosial berbagai kaum di Hindia Belanda.

JS. Dalam tulisan “Oral History dan Women in History”, Anda menekankan metode oral history dalam sejarah perempuan. Apa keunggulan dan tantangan metode ini dalam sejarah Indonesia? Apakah metode oral history ini bisa diterapkan untuk tema-tema atau periode lebih klasik? Adakah metode lain yang Anda terapkan dalam penulisan sejarah perempuan?

Saya tidak melihat sejarah lisan sebagai sebuah metode penelitian atau teknik pengumpulan data melalui wawancara belaka. Sejarah lisan dalam historiografi Indonesia, seperti halnya sejarah perempuan, adalah cabang-cabang yang tak terurus dari pohon besar bernama sejarah. Padahal, kalau digarap dengan agenda riset dan politik yang jelas keduanya berpotensi besar untuk memperkaya sejarah Indonesia. Sebagai disiplin, sejarah di Indonesia terlalu lama dikurung dalam perdebatan-perdebatan politik kuasi ideologis yang tidak mendorong perkembangan teori dan pendekatan untuk memperdalam pemahaman kita tentang keberagaman Indonesia. Disamping itu, ada juga masalah penyederhanaan kerangka analitik yang membuat studi-studi empiris jadi seperti laporan penelitian lapangan. Di satu sisi, pemanfaatan sejarah oleh penguasa untuk mengendalikan cara kita mengingat masa lalu selama puluhan tahun sudah menumpulkan gairah kritisisme dalam mempelajari sejarah. Di lain sisi, minimnya dukungan institusional dan finansial untuk kegiatan penelitian sejarah membatasi kedalaman dan keluasan jangkauan kerja yang mungkin dilakukan periset. Kenyataan bahwa sejarah diperlakukan sebagai pelajaran sampingan di sekolah semakin mempersulit upaya-upaya untuk menumbuhkan kesadaran sejarah sejak dini.

Dalam kondisi seperti ini saya melihat potensi sejarah lisan untuk membuat terobosan-terobosan kecil, terutama dengan berkembang pesatnya teknologi digital. Seperti yang sudah muncul lewat film-film dokumenter dan karya-karya kreatif lainnya, kisah-kisah mereka yang terpinggirkan menarik perhatian publik. Mungkin yang memproduksi karya-karya tersebut bukan sejarawan “profesional” dan hasilnya “tidak ilmiah” (Nordholt, Purwanto, & Saptari, 2008), tetapi kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa kisah-kisah yang disampaikan bukan sejarah hanya karena kita tidak setuju pada pilihan sumber dan cara penyampaian yang berbeda. Selain sebagai jalan masuk untuk membuat orang tertarik pada sejarah, terutama dari generasi muda, sejarah lisan memungkinkan pengungkapan kisah-kisah yang tersembunyi dan dengan demikian mendemokratisasikan sejarah. Apalagi masyarakat Indonesia di masa lampau, terutama

yang tidak terdidik atau buta huruf –dan sebagian besar perempuan masuk di dalamnya—tidak terbiasa mencatat dan menyimpan dokumen dengan seksama. Kalau prioritas penciptaan sejarah masih bertumpu pada sumber-sumber berupa dokumen tertulis, atau barang cetakan dalam bahasa Indonesia dan Belanda, dengan sendirinya kaum-kaum yang tidak menulis dan membaca huruf Latin akan terpinggirkan dari sejarah.

Memang ada keterbatasan dari segi periode untuk menyusun sejarah lisan. Saya sendiri mengalami kesulitan ini ketika ingin mengetahui lebih banyak tentang pengalaman perempuan di masa revolusi. Figur-figur penting yang dapat bercerita sebagian besar sudah tidak ada, sementara dokumen tertulis tidak banyak menggambarkan peran perempuan secara mendalam. Di negeri-negeri yang tradisi sejarah lisannya sudah dimulai lebih awal cakupan periode yang digarap lewat pengumpulan cerita dari pelaku-pelaku sejarah cukup jauh. Seperti di AS sejarah lisan dimulai seiring dengan kemunculan gerakan-gerakan yang menuntut kesetaraan dan keadilan gender, ras, dan kelas pada 1960-an. Begitu juga koleksi arsip lisan korban holokaus NAZI di seluruh dunia luar biasa penanganannya dan pengolahannya. Karena itulah karya-karya kreatif tentang holokaus seperti tidak ada habisnya.

Tantangan lain penulisan sejarah lisan terkait dengan metodologi dan etik dalam produksi narasi. Praktik-praktik konvensional dalam riset sejarah mengagungkan kemampuan sejarawan menangkap masa lalu seakurat mungkin dan memproduksi pengetahuan tentang masa lalu secara imajinatif. Otoritas sejarawan ditentukan oleh kemampuannya menetapkan legitimasi pengalaman orang lain sebagai sesuatu yang bersejarah dan mengandung kebenaran. Di Indonesia masih sering diperdebatkan apakah peneliti sejarah itu “objektif” atau “subjektif”, seakan-akan ada mistar yang dapat digunakan untuk mengukur kadar kebenaran suatu interpretasi. Praktik sejarah lisan bertolak-belakang dengan praktik-praktik konvensional ini. Sumber sejarah lisan adalah narasi yang tidak dipersiapkan dan tak terduga. Peneliti sejarah tidak dapat semena-mena menganalisis atau mendekonstruksi rekaman cerita tanpa melibatkan perbincangan dengan si pencerita. Riset sejarah lisan menuntut produksi narasi bersama yang sarat intersubjektivitas, bergantung pada temporalitas dan spasialitas, dan mensyaratkan negosiasi terus-menerus antara pewawancara dan yang diwawancarai.

Bagi peneliti yang terbiasa dengan dokumen tertulis dan berprasangka bahwa yang tertulis itu yang sah, sulit untuk masuk riset sejarah lisan. Subjektivitas memori dalam sejarah lisan adalah kekuatan narasi personal, bukan kelemahan. Peneliti diharapkan berempati dengan pencerita dan mengakui seluruh subjektivitasnya, termasuk kealpaan, kebohongan, kebingungan akan fakta, fantasi, gairah yang tersembunyi, atau kepercayaan dan ideologi yang dikonstruksi kekuasaan. Tugas peneliti bukanlah mengukur kebenaran atau kebernalaran cerita seseorang, tetapi memahami apa yang dianggap pencerita sebagai kebenaran dan bagaimana ia sampai pada keyakinan tersebut. Di sinilah sejarawan lisan dapat melakukan analisis tentang dampak dari terpaparnya seorang terhadap norma-norma sosial yang dominan atau paham ideologis tertentu dan reaksi pencerita terhadapnya. Namun, tetap harus diperhatikan bahwa cerita-cerita individual ini tidak sepenuhnya berdiri sendiri. Setiap cerita, bagaimana pun uniknya, tetap tertanam dalam hubungan-hubungan sosial dan struktur tertentu.

Untuk periode-periode tertentu sejarah lisan sangat bermanfaat untuk mengungkap kesejarahan pengalaman perempuan. Analisis gender berguna untuk melihat pola umum penindasan dan diskriminasi terhadap perempuan, sekaligus menyelidiki infrastruktur yang memproduksi pengetahuan yang dominan tentang perbedaan peran-peran sosial secara seksual dan acuan-acuan normatif tentang maskulinitas dan femininitas. Sedangkan sejarah lisan menyingkap riwayat perempuan-perempuan yang hidup di dalam struktur kekuasaan hirarkis tersebut dan perjuangan mereka untuk memperluas bidang-bidang gerakannya, apakah itu dengan negosiasi, kompromi, atau perlawanan terbuka. Dari pengungkapan serupa inilah bangunan pengetahuan perempuan disusun dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Yang menarik dari sejarah lisan adalah narasi yang lahir dari tarik ulur antara kenangan akan masa lalu dan interpretasi pencerita terhadap masa lalu tersebut menggambarkan kompleksitas pengetahuan orang atau komunitas tentang peristiwa-peristiwa, atau bahkan konsep-konsep umum yang diasumsikan sudah jelas maknanya. Pengalaman saya mewawancarai sejumlah perempuan tentang arti kemerdekaan, misalnya, memperlihatkan bahwa rasa merdeka itu tidak selalu ada hubungannya dengan bebas dari penjajahan Belanda. Bahkan diantara mereka ada yang tidak pernah bertemu satu orang Belanda pun dalam hidupnya. Secara konkrit yang mereka rasakan adalah kebebasan bergerak dari satu tempat ke tempat lain dan terlibat dalam bermacam-macam kegiatan kemasyarakatan, apakah itu pemberantasan buta huruf, persiapan perayaan 17 Agustus, atau penyaluran bantuan korban bencana alam. Makna kemerdekaan lebih kaya dan meriah daripada yang ditampilkan buku-buku sejarah konvensional atau sandiwara penuh perang-perangan di film dan televisi.

Ketika wawancara pelaku-pelaku sejarah tidak dimungkinkan lagi, untuk memperluas cakupan studi sejarah perempuan saya melihat ada kebutuhan besar untuk mencari dan mempelajari arsip-arsip yang tersebar di daerah dalam bahasa atau aksara lokal. Saya sendiri belum pernah menjelajahi kemungkinan ini sehingga saya tidak tahu persis status keberadaan arsip-arsip tersebut. Saya terkesan dengan studi Ann Kumar (2008) tentang buku harian yang ditulis dalam aksara Jawa dan Pegon oleh seorang prajurit perempuan di kraton Mangkunegara I pada abad ke-18. Keberadaan pasukan elite perempuan itu saja sudah menarik pembahasannya. Ditambah lagi dengan ulasan tentang catatan pengamatan yang dilakukan si prajurit terhadap kegiatan-kegiatan para prajurit sehari-hari sampai perkembangan politik dan ekonomi kraton.

Saya juga menduga bahwa di daerah-daerah yang tradisi sastranya berumur panjang dan sangat canggih, seperti Sulawesi Selatan, Aceh, dan Minangkabau, atau di daerah-daerah tempat misionaris pertama kali bekerja, seperti Minahasa, Ambon, dan Timor seharusnya terdapat catatan-catatan yang dapat mengungkap kehidupan perempuan. Salah satu sastrawan perempuan Bugis yang sudah sering disebut namanya, Colliq Pujie, perlu dituliskan riwayat hidupnya. Ia terutama dikenal sampai ke dunia internasional karena ia menyalin ribuan halaman naskah kuno *sureq I La Galigo* yang kemudian dinyanyikan oleh seniman-seniman di beberapa negara. Meneliti tentang kehidupan perempuan-perempuan ini berarti mempelajari juga masyarakat yang memungkinkan mereka untuk tampil dan mengambil peran-peran yang tidak biasa diasosiasikan dengan keperempuanan. Masyarakat seperti apa itu? Seberapa jauh otoritas perempuan dalam menentukan apa yang dapat dan tidak dapat dia lakukan?

Saya kira kita tidak perlu ragu-ragu untuk merambah ke wilayah sejarah perempuan pra-kolonial. Kita bisa melihat ke kerja-kerja yang dilakukan sejarawan-sejarawan feminis di India, misalnya, yang dengan tekun mempelajari epigrafi dan arkeologi untuk meneliti sejarah perempuan di masa pra-kolonial. Pengalaman ini membuat mereka sangat terampil secara metodologis dan mumpuni dalam berteori. Penelitian serupa di Indonesia akan dapat mengimbangi penulisan sejarah lokal yang mengandung “chauvinisme” lokal atau semangat etnonasionalistik dan memberi pembenaran terhadap kekuasaan elite daerah. Selain itu, kita dapat menguji keabsahan klaim bahwa perempuan-perempuan Nusantara sebenarnya lebih menikmati kebebasan sebelum kedatangan pedagang-pedagang Eropa dan pendirian negara kolonial. Apakah kebebasan ini juga mencakup kesetaraan dalam kepemilikan tanah atau harta kekayaan lainnya? Apakah perempuan berhak untuk mengontrol proses produksi atau sekadar pelaksana di lahan pertanian? Bagaimana dengan kewenangan perempuan atas kegiatan-kegiatan yang disebut “reproduksi sosial”, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan mengandung, pengasuhan anak, penyajian makanan, dan pemeliharaan kesehatan keluarga? Pertanyaan-pertanyaan ini selama ini berusaha dijawab oleh studi-studi antropologi dan sosiologi. Sejarah perempuan perlu menyumbangkan pandangan-pandangan yang dapat menjelaskan historisitas

dari peran-peran sosial perempuan dan konsep-konsep yang dilekatkan pada konstruksi keperempuanan di berbagai wilayah.

JS: Adakah contoh karya sejarah atau sejarawan perempuan yang bisa menjadi model? Apa pesan Anda pada pelajar dan mahasiswa yang ingin menekuni sejarah perempuan?

AAR: Di atas saya sudah menyebutkan beberapa tulisan sejarah yang saya anggap baik untuk dipelajari dan dijadikan model. Untuk Indonesia saya banyak memperhatikan karya-karya yang membahas gerakan sosial karena saya sangat tertarik akan beragam cara masyarakat memahami dan mewujudkan rasa berbangsa. Sayangnya memang karya-karya yang saya anggap “klasik” tidak membahas tentang peran perempuan atau pola-pola relasi gender yang menentukan format kekuasaan di wilayah-wilayah yang menjadi fokus penelitian. Disinilah ruang-ruang untuk melakukan studi sejarah perempuan dengan perspektif gender sangat terbuka.

Menurut saya, empat karya yang sampai hari ini tetap penting untuk selalu dipertimbangkan adalah karya-karya Sartono Kartodirdjo (1984), *Pemberontakan Petani Banten 1888*, Takashi Shiraishi, *Zaman Bergerak* (1997), Anton Lucas (1989), *Peristiwa Tiga Daerah*, dan Benedict Anderson, *Revolusi Pemoeda* (1988). Masing-masing karya mengajukan argumen-argumen yang penting untuk perkembangan historiografi Indonesia sejak pemilihan subjek, analisis terhadap sumber, hingga sudut pandang kesejarahan. Kartodirdjo mengangkat soal “historiografi Indonesiasentris” untuk menggugat historiografi kolonial lewat pengamatannya terhadap gerakan petani yang dianggap tidak politis oleh sejarawan Belanda. Praktik pelabelan semacam ini masih berlangsung dan belum sepenuhnya didekonstruksi lewat penelitian-penelitian sejarah yang baru.

Persoalan serupa juga muncul dalam studi Shiraishi. Ia mengamati bagaimana sejarawan kolonial, Petrus Blumberger, menciptakan kategori-kategori baru secara arbitrer, yaitu nasionalis, agama, dan komunis, untuk memudahkan pemerintah Belanda memahami afiliasi ideologis dan mengontrol individu atau kelompok-kelompok yang aktif dalam pergerakan di 1920-an. Menariknya, kategori-kategori tersebut kemudian diadopsi oleh tokoh-tokoh pergerakan pada periode berikutnya, bahkan menjadi landasan politik persatuan Nasakom Sukarno di 1960-an. Walaupun sudah tidak ada golongan komunis dan konstelasi politik Indonesia semakin kompleks setelah reformasi, pemahaman umum tentang golongan-golongan politik di Indonesia kurang lebih masih sama. Agak mirip dengan berkeraknya pemahaman antropologis yang terus mengikuti tesis Geertz tentang kaum-kaum “santri”, “priyayi”, dan “abangan”.

Karya berikutnya adalah karya Takashi Shiraisi yang dengan sangat menarik tentang pergerakan massa melahirkan bahasa dan kosa kata baru yang mencerminkan taraf kesadaran aktivis di masa itu akan pentingnya berorganisasi secara modern. Kalau kita bandingkan studi Shiraishi dengan studi-studi Lucas dan Anderson, kita dapat gambaran tentang perbedaan karakter orang-orang pergerakan di tahun 1920-an dengan mereka yang bergerak di masa revolusi 1945-1949. Demikian pula idiom-idiom yang dipakai punya muatan historis tersendiri untuk tiap masa. Misalnya, kata “revolusi” atau “revolusioner” menunjukkan ekspresi yang berbeda-beda, bahkan berlawanan, lewat aksi-aksi buruh, kaum proletar di pedesaan, atau “pemoeda” di daerah urban. Ketekunan dan ketelitian Anderson dan Lucas dalam menelusuri riwayat pelaku-pelaku sejarah mengesankan. Sebagian dari mereka kemudian berperan penting dalam pendirian republik ini dan tampil sebagai orang-orang mulia, berbudi luhur, dan tanpa cela dalam narasi resmi. Sedangkan, kedua peneliti ini justru memberi gambaran yang lebih manusiawi tentang perdebatan-perdebatan sengit, saling telikung, dan kekacauan dalam perumusan makna kemerdekaan.

Secara khusus saya tertarik dengan sejarah Batavia/Jakarta. Menurut saya kota ini adalah replika Indonesia yang paling tua dan orisinal. Kota ini juga mengandung begitu banyak kontradiksi kultural dan politik yang bersejarah luar biasa. Sejak paling tidak abad ke-17 Jakarta sudah multikultural dengan komposisi kelas yang juga beragam. Mulai dari suku bangsa-suku bangsa Nusantara, bangsa-bangsa Eropa, Tionghoa, Arab, India, dan golongan-golongan peranakan berkumpul dan bergaul di kota ini. Belum lagi budak, buruh, kaum miskin kota, sampai kapitan, tentara, dan saudagar-saudagar manca negara. Dia sempat menjadi sarang penyakit, tapi juga pernah ditahbiskan sebagai salah satu kota kolonial tercantik di dunia. Pertarungan kekuasaan antar kapitalis, serta antara kapitalis dan penguasa feodal, kolonial, dan nasional, berlangsung dengan ketat. Tidak ada habisnya membicarakan sejarah Jakarta. Wilayah ini banyak mendapat perhatian dari sejarawan-sejarawan perempuan yang mumpuni, seperti Mona Lohanda, Susan Abeyasekere, dan Jean Gelman Taylor. Masing-masing memperlihatkan bagaimana “dunia sosial” Batavia/Jakarta dibentuk dan dihidupkan oleh banyak kekuatan dengan beragam-ragam identitas. Kalau kita sisir saja salah satu dari sekian argumen mereka, kita dapatkan pokok-pokok keindonesiaan yang fundamental: peran sentral kaum Tionghoa dalam pembangunan Batavia (Lohanda), perempuan sebagai penghubung berbagai kaum melalui mobilitas mereka sebagai budak, nyai, dan pembantu (Abeyasekere), dan budaya “Indies” sebagai medium pertemuan antara kaum bumiputra, peranakan, Tionghoa dan Belanda (Taylor).

Di luar Indonesia saya belajar banyak dari karya-karya sejarawan feminis. Saya terutama terkesan dengan sejarawan-sejarawan India, seperti Tanika Sarkar, Uma Chakravarty, Mrinalini Sinha, Radha Kumar, dan Urvashi Butalia. Militansi dan kepekaan mereka dalam menelaah masyarakatnya luar biasa mengagumkan. Kadang-kadang saya tidak terlalu mengerti subjek yang mereka bahas karena topik yang menjadi perbincangan begitu spesifik tentang peristiwa tertentu di daerah yang tidak pernah saya dengar namanya. Belum lagi ketrampilan mereka mengolah sumber-sumber lokal dalam berbagai bahasa daerah dan medium. Mereka juga terampil menggunakan kerangka analitik interseksional untuk memperlihatkan kesaling-terhubungan kategori-kategori sosial, yaitu gender, kelas, kasta, atau agama dalam menciptakan sistem-sistem yang diskriminatif pada berbagai periode, termasuk di masa India Kuno sekali pun. Salah satu karya Radha Kumar (1993) tentang sejarah gerakan perempuan dan feminisme, *The History of Doing*, perlu dibuat padanannya di Indonesia. Formatnya populer dengan banyak foto, tapi ulasannya mendalam dan sumber-sumbernya cukup lengkap untuk menggambarkan perkembangan gerakan perempuan di berbagai lini.

Saya juga mempelajari karya-karya sejarawan perempuan AS, Inggris, dan Kanada, seperti Joan Scott, Linda Gordon, Sheila Rowbotham, Christine Hall, dan Natalie Zemon Davis. Masing-masing punya kekuatan sendiri tapi semua mengedepankan perspektif feminis dalam studi-studinya. Di bagian awal saya sudah diskusikan proposisi teoretik Joan Scott. Dari nama-nama yang lain, yang paling mengesankan bagi saya adalah kepekaan mereka dalam membaca sumber sehingga narasi yang dihasilkan kaya nuansa dan kuat wawasan politiknya. Apa pun tema yang mereka angkat, mereka dapat memperlihatkan bagaimana pola-pola relasi gender dan norma-norma kultural yang menentukan peran-peran gender berubah sebagai tanggapan terhadap kondisi historis tertentu. Apakah itu politik dan sejarah kekerasan keluarga di AS (Gordon), pergulatan perempuan dalam merumuskan politik kesejahteraan sosial di Inggris (Rowbotham), upaya imperium Inggris memberadatkan rakyat di daerah jajahan (Hall), atau pengalaman perempuan pinggir di Eropa abad ke-17 (Davis), semuanya memaparkan tautan yang signifikan antara perubahan-perubahan politik dalam skala yang lebih besar dengan pengalaman perempuan sampai ke ranah yang paling pribadi, tubuh perempuan. Sebaliknya, dengan narasi yang cerdas dan bernas mereka dapat menggambarkan secara komprehensif kehidupan masyarakat dalam periode-periode yang mereka teliti melalui pengalaman

perempuan. Kredo feminis yang paling terkenal “soal personal itu politis” menjadi begitu konkrit dalam ulasan para sejarawan ini.

Bagi mereka yang berniat menekuni sejarah perempuan saya pikir yang paling penting adalah kesiapan untuk mempertanyakan apa pun yang sudah dianggap pakem atau sudah selayaknya, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kesejarahan yang baru. Saya ingat ketika saya membantu Komnas Perempuan mengkoordinir kegiatan yang disebut “proses belajar sejarah bersama”, banyak peserta yang tidak tahu apa-apa tentang serangan terhadap perempuan dalam operasi penumpasan G30S 1965. Peserta berasal dari bermacam-macam organisasi massa perempuan, seperti Dharma Wanita, Fatayat NU, Nasyiatul Aisyiyah, dan Wanita Katolik RI. Sebelumnya mereka sangat curiga dengan Gerwani. Begitu ditampilkan teks-teks propaganda hitam tentang Gerwani yang dimuat di koran-koran di masa itu, mereka terkejut sekali. Apalagi setelah mereka bertemu dengan ibu-ibu mantan aktivis Gerwani dan melihat bahwa ibu-ibu ini ternyata perempuan-perempuan biasa, yang punya cita-cita pemajuan perempuan kurang lebih serupa. Yang menarik setelah perjumpaan ini diantara peserta muncul keinginan untuk menyelidiki sejarah organisasi masing-masing dan belajar dari sesepuh dalam komunitas mereka tentang perjuangan mereka mencapai kesetaraan. Mereka baru sadar bahwa pengetahuan sejarah mereka tentang organisasi mereka sendiri saja sangat terbatas.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kesejarahan dalam kategori dan konsep yang selama ini kita pakai dalam perbincangan tentang perempuan. Pertama, kategori perempuan itu sendiri perlu diperluas dengan pembedaan-pembedaan menurut etnisitas, ras, kelas, agama, umur, orientasi seksual, dan identitas-identitas yang lain. Selain untuk menghindari esensialisme perempuan, pendekatan ini juga penting untuk menetakkan keberagaman sebagai prinsip dalam penulisan sejarah Indonesia. Kedua, konsep patriarki yang sering dibicarakan selama ini terkesan homogen dan ahistoris. Sejarah perempuan dengan perspektif feminis seharusnya dapat memperlihatkan bagaimana hubungan antara patriarki dengan struktur-struktur penindasan yang lain, seperti feodalisme, kapitalisme, atau militerisme. Patriarki juga mengambil bentuk yang berbeda-beda dari daerah ke daerah dan masa ke masa. Apalagi ada masyarakat-masyarakat yang menganut tradisi matrilineal, banyak perempuan menjadi kepala keluarga, dan perempuan menjadi pimpinan daerah. Apa arti patriarki di tengah masyarakat yang perempuannya tampak dominan? Kalau mungkin melakukan sejarah lisan, maka pemaparan tentang perbedaan-perbedaan ini akan tampak lebih jelas.

Yang terakhir, kita perlu memperhatikan arena-arena yang selama ini digeluti perempuan tapi jarang dibicarakan dalam sejarah, seperti rumah tangga, keluarga, pasar tradisional, atau industri-industri yang padat buruh perempuan, misalnya batik dan perkebunan teh. Seperti sudah digugat oleh Ruth Indiah Rahayu (2007), sejarah perempuan Indonesia terlalu penuh dengan puja-puji terhadap tokoh-tokoh dari kelas atas dan terdidik, seperti Kartini, Dewi Sartika, dan para pendiri Kongres Perempuan Indonesia. Ann Stoler, Elsbeth Locher-Scholten, dan Francis Gouda sudah menyumbangkan pemikirannya tentang bagaimana pemerintah kolonial membangun hirarki yang ketat berdasarkan ras, kelas, dan gender berdasarkan azas-azas “modernitas”. Namun, sedikit sekali kita dapatkan cerita tentang kehidupan nyai, pengasuh anak, atau “baboe tjoetji” di berbagai daerah. Kita juga memerlukan riset-riset lebih mendalam tentang kekerasan terhadap perempuan di masa pendudukan Jepang dan masa revolusi. Catatan pelanggaran HAM dan rekaman cerita tentang para perempuan yang menjadi “jugun ianfu” atau budak seksual tentara Jepang cukup lengkap. Yang diperlukan adalah gambaran konteks historis dari struktur penganiayaan tersebut, termasuk keluasan sasaran operasi yang berpengaruh terhadap pola hubungan rasial antara orang Indonesia, Indo-Eropa, Belanda dan Tionghoa di masa dekolonisasi. Saya sadar bahwa sumber-sumber yang ada untuk menulis sejarah dari sudut pandang kaum yang terpinggirkan sangat terbatas. Ini tantangan metodologis yang cukup berat. Tapi, jika kita ingin memperluas visi epistemologis kita, tidak bisa tidak kita

harus merambah wilayah-wilayah pengetahuan yang jarang kita perhatikan, atau bahkan yang kita duga sudah kita ketahui dengan baik.

Vancouver, 25 April 2021

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, B. R. (2006). *Imagined Communities : Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (Original work published in 1983 ed.). London: Verso.
- Bennett, J. M. (2006). *History Matters: Patriarchy and the Challenge of Feminism*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Erman, E. (2004). Labouring Communities: Women's Roles in the Ombilin Coal Mines of Sumatra (1892–1965). Dalam B. Elmhirst, & R. Saptari, *Labour in Southeast Asia: Local Processes in a Globalised World*. London: Routledge.
- Fatimah, S. (2008). Perspektif Jender dalam Historiografi Indonesia. Dalam D. Marihandono (Peny.). *Titik Balik Historiografi di Indonesia* (pp. 383-392). Jakarta: Wedyatama Widya Sastra dan Departemen Sejarah FIB UI.
- Kumar, A. (2008). *Prajurit Perempuan Jawa: Kesaksian Ihwal Istana dan Politik Jawa Akhir Abad ke-18*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Kumar, R. (1993). *The History of Doing: An Illustrated Account of Movements for Women's Rights and Feminism in India 1980-1990*. London: Verso.
- Lerner, G. (1993). *The Creation of Feminist Consciousness : From the Middle Ages to Eighteen-seventy*. New York: Oxford University Press.
- Nordholt, H. S., Purwanto, B., & Saptari, R. (Ed.). (2008). *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, KITLV-Indonesia, Pustaka Larasan.
- Pradadimara, Dias. (2019). Perspektif Gender dalam Sejarah Indonesia. *Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya*, Vol. 14, No. 1.
- Rahayu, R. I. (2007). Konstruksi Historiografi Feminisme Indonesia dari Tutur Perempuan. Makalah tidak diterbitkan. Workshop Historiografi Indonesia: di antara Historiografi Nasional dan Alternatif, diselenggarakan oleh Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM dan Australia Research Council, Yogyakarta, 2-4 Juli 2007.
- Ratih, A. A. (2007). Melacak Kesejarahan Perempuan: Sebuah Tawaran. Makalah tidak diterbitkan. Workshop “Historiografi Indonesia diantara Historiografi Nasional dan Historiografi Alternatif”, diselenggarakan oleh Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM dan Australia Research Council, Yogyakarta, 2–4 Juli 2007.
- Ratih, I. G. (2019). Ruang Perempuan dan Kerancuan Memori Sosial. *Prisma*, 38(2), 33-47.
- Scott, J. W. (1986). Gender : a Useful Category of Historical Analysis. *American Historical Review*, 91 (5), 1053–1075.
- Sewell, W. H. (2005). *Logics of History: Social Theory and Social Transformation*. Chicago: University of Chicago Press.
- Stoler, A. L. (1995). *Race and the Education of Desire: Foucault's History of Sexuality and the Colonial Order of Things*. Durham: Duke University Press.
- Stoler, A. L. (2010). *Carnal Knowledge and Imperial Power: Race and the Intimate in Colonial Rule*. Berkeley: University of California Press.
- Toer, P. A. (2000). *Panggil Aku Kartini Saja*. Jakarta: Hasta Mitra.